

Wacana Kuasa Negara dalam Berita Polisi Korban Demo di Detik.com

Safira Ayu Maulidyyah¹, Kiki Malika Primadani²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²
ayumaulidyyah@gmail.com

Abstract:

The news article "Prabowo Will Promote Police Officers Who Were Victims of Mass Actions" published by Detik.com analyzes the relationship between power and ideology. Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis theory was used to conduct this research. This theory covers three dimensions: text, discourse practice, and socio-cultural practice. In addition, it also includes an examination of ideology. Descriptive qualitative analysis was used to examine the news text quotes in their entirety. The results of the study show that the text portrays the authorities as victims and heroes, and the demonstrators are classified as legitimate and illegitimate. Access to discourse is dominated by the President without presenting any opposing voices. In the socio-cultural context, this discussion reinforces the idea that the state protects the authorities and controls its citizens. Ideological analysis reveals that the news is laden with security and order ideology that normalizes state domination over public freedom.

Keywords: critical discourse analysis, Norman Fairclough, language politics, Prabowo Subianto, Police.

Abstrak:

Berita "Prabowo Akan Naikkan Pangkat Polisi Korban Aksi Massa" yang diterbitkan oleh Detik.com menganalisis hubungan kuasa dan ideologi. Teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough digunakan untuk melakukan penelitian ini. Teori ini mencakup tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya. Selain itu, itu juga mencakup telaah ideologi. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk memeriksa kutipan teks berita secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks menempatkan aparat sebagai korban dan pahlawan, dan demonstran diklasifikasikan sebagai yang sah dan tidak sah. Akses wacana didominasi oleh Presiden tanpa menghadirkan suara tandingan. Dalam konteks sosiokultural, diskusi ini memperkuat gagasan bahwa negara menjaga aparat dan mengontrol warganya. Analisis ideologi mengungkap bahwa berita sarat ideologi keamanan dan ketertiban yang menormalisasi dominasi negara atas kebebasan publik.

Kata kunci: analisis wacana kritis, Norman Fairclough, politik bahasa, Prabowo Subianto, Polisi.

PENDAHULUAN

Media massa adalah sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dilihat dari maknanya, media massa adalah alat atau sarana untuk menyebarkan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain (Habibie, 2018). Perkembangan teknologi modern juga memengaruhi fungsi media. Dua hal dapat terjadi: kebebasan media massa dan dukungan teknologi. Akses informasi yang lebih mudah akan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang pada akhirnya akan menghasilkan demokratis. Di sisi lain, kebebasan tidak selalu berarti tanggung jawab moral. Teknologi memungkinkan hubungan dalam skala yang lebih besar (Nur, 2021). Dianggap sebagai globalisasi, Fenomena ini meningkatkan hubungan yang ada di antara bidang ekonomi, politik, masyarakat, dan budaya. Media ditunjukkan sebagai alat untuk mempercepat dan menghilangkan hambatan dalam proses ini.

Media massa memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan persepsi dari realitas yang digambarkan. Media massa mempengaruhi bahasa dan makna melalui berbagai cara, termasuk menciptakan makna baru dan hubungannya, memperluas makna istilah dengan makna baru, dan memantapkan norma makna bahasa yang sudah ada. Oleh karena itu, penggunaan bahasa tertentu memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana makna tertentu muncul, bagaimana kata-kata dipilih, dan bagaimana makna tersebut digunakan. (Yoserizal, 2018). Media massa biasanya mengkonstruksi realitas dengan berbagai cara, yang berdampak besar pada pembentukan makna atau gambaran tentang realitas sosial. Salah satu cara ini adalah dengan memilih leksikal, kata-kata, atau bahasa, meskipun media massa hanya melaporkan. Namun, jika kata-kata, istilah, atau simbol yang dipilih secara konvensional memiliki arti tertentu di masyarakat, maka itu pasti akan membentuk gambaran yang buruk atau baik tentang realitas sosial.

Aparat keamanan dan masyarakat sipil bersitegang setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025. Tidak hanya peristiwa ini mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan berbagai cerita politik di masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah mencoba mengurangi ketegangan dengan memberikan perhatian khusus kepada anggota staf yang menjadi korban. Kebijakan Presiden Prabowo yang mewajibkan kenaikan pangkat bagi polisi yang menjadi korban demonstrasi adalah salah satunya. Media massa kemudian menyiarkan kebijakan ini. Media tidak hanya

menyebarkan informasi, tetapi juga menggambarkan tindakan Prabowo sebagai bukti perhatian dan komitmen seorang pemimpin. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah sosial-politik pasca demo tidak dapat dilepaskan dari wacana media yang sarat ideologi dan hubungan kekuasaan. Berita tentang keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada polisi yang menjadi korban aksi massa menunjukkan bagaimana bahasa menciptakan persepsi tertentu. Polisi direpresentasikan sebagai korban sekaligus pahlawan, sedangkan demonstran dibedakan antara “murni” yang sah dan “perusuh yang niatnya bakar” yang diberi label negatif. Bahasa seperti ini tidak netral, sebaliknya hal itu menunjukkan cara kuasa negara menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan dan siapa yang dianggap sebagai ancaman. Salah satu masalah yang muncul dari pemberitaan ini adalah bagaimana media menggambarkan relasi kuasa dan ideologi dengan mengutamakan suara Presiden, sementara masyarakat sipil dan demonstran tidak.

Relevansi masalah dalam analisis ini adalah mengungkap bagaimana kekuasaan negara (diwakili oleh pejabat tinggi seperti Prabowo dan aparat kepolisian) memposisikan diri terhadap warga yang melakukan aksi massa. Dalam teori Fairclough: teks (artikel), praktik diskursus (pemberitaan media), dan praktik sosial (kekuasaan, hukum, hak sipil) terjalin (Khotimah & Khotimah, 2024). Dengan menganalisis bagaimana media menyajikan kata-kata pejabat, pemilihan diksi, dan framing "korban aparat" versus "perusuh", kita dapat memahami bagaimana wacana membentuk persepsi publik dan memperkuat kekuasaan tertentu. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat dianggap sebagai pihak yang "direndahkan" atau "ditempatkan" sebagai pihak yang mungkin melanggar undang-undang. Ini berkaitan dengan bahasa, ideologi, dan struktur sosial-politik Indonesia kontemporer, yang membuatnya sangat penting untuk studi sastra dan komunikasi Indonesia.

Sejauh ini, penelitian analisis wacana kritis di Indonesia telah banyak membahas representasi media terhadap demonstrasi, konflik massa, dan peran aparat keamanan. Namun, sebagian besar penelitian lebih fokus pada kekerasan aparat terhadap demonstran atau pelanggaran hak asasi manusia dalam demonstrasi. Sangat sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari bagaimana aparat diposisikan sebagai korban yang berhak atas penghargaan, seperti kenaikan pangkat yang signifikan, serta

bagaimana narasi tersebut dibuat dan didistribusikan melalui media arus utama. Selain itu, penelitian saat ini sebagian besar berkonsentrasi pada tindakan represif aparat dan kurang mempelajari wacana pasca-kericuhan yang diciptakan pejabat negara untuk meneguhkan legitimasi kekuasaan mereka. Selain itu, penelitian tentang demonstrasi di Indonesia biasanya menitikberatkan pada analisis framing media terhadap massa sebagai aktor kolektif. Namun, elemen linguistik dari pernyataan pejabat, seperti dikotomi antara "demonstran murni" dan "perusuh yang niatnya bakar", masih belum dipelajari secara menyeluruh dalam kerangka analisis wacana kritis. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian untuk mengkaji bagaimana bahasa yang digunakan pejabat negara dalam pemberitaan media tidak hanya merepresentasikan aparat sebagai korban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hegemonik yang membatasi ruang demokratis warga dengan cara mengonstruksi legitimasi negara.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Norman Fairclough, Analisis Wacana Kritis (AWK) menganggap bahasa sebagai tindakan sosial yang tidak netral yang mengandung hubungan antara kuasa dan ideologi yang bekerja di dalamnya. Fairclough mengklasifikasikan analisis menjadi tiga komponen: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiganya mempelajari cara bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang kekuasaan. Metode ini sangat sesuai untuk menganalisis teks media, yang seringkali berfungsi sebagai alat hegemonik untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung kepentingan tertentu.

Penelitian pertama oleh (Sari et al., 2025). Penelitian ini terbit pada tahun 2025 dan fokus mengkaji wacana kebijakan budaya yang menonjolkan nasionalisme dan kebanggaan atas pengakuan UNESCO, dengan media mereproduksi hegemoni pemerintah melalui narasi keberhasilan diplomasi bahasa dan penguatan identitas nasional. Data penelitian berasal dari empat teks berita yang dianalisis menggunakan AWK Fairclough yang menetapkan tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Perbedaan ini terlihat pada konstruksi teks: Detik.com berpotensi menampilkan polisi sebagai pahlawan dan korban, sedangkan Antaranews.com menekankan pencapaian negara tanpa banyak berbicara tentang tantangan implementasi kebijakan bahasa.

Penelitian kedua oleh (Sumber et al., 2024). Penelitian ini terbit pada tahun 2023 dan berfokus pada representasi tokoh, hubungan kekuasaan, dan ideologi yang digambarkan oleh media dalam pemberitaan jelang pemilihan presiden. Penelitian tersebut juga menunjukkan bagaimana media membingkai gambar Prabowo dan Anies dengan menggunakan kosakata, metafora, intertekstualitas, dan konteks sosial-budaya, menunjukkan hubungan kuasa antara media, aktor politik, dan pembaca. Oleh karena itu, perbedaan utamanya terletak pada masalah yang dibahas (politik elektoral versus institusional negara), aktor utama (politisi versus aparat kepolisian), dan pesan ideologis (pencitraan kandidat versus legitimasi kekuasaan negara). Semua ini terjadi meskipun keduanya memprioritaskan praktik representasi, relasi, dan ideologi media sesuai dengan model Fairclough.

Penelitian ketiga oleh (Mada, 2020). Penelitian ini terbit pada tahun 2020 dan berfokus pada diskusi siaran pers Polri dengan menggunakan teori Norman Fairclough untuk mengeksplorasi hubungan antara ideologi dan kuasa dalam pemberitaan. Penelitian tersebut memfokuskan pada konstruksi citra kelompok anarko sebagai “perusuh” melalui praktik bahasa kepolisian yang sepihak, di mana informasi hanya bersumber dari Polri dan menyingkirkan suara kelompok anarko. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan penting yang terlihat: (1) subjek diskusi (misalnya, siaran pers resmi Polri dibandingkan dengan berita di media online Detik.com), (2) sudut pandang representasi (misalnya, stigmatisasi kelompok sipil dibandingkan dengan pengagungan aparat), (3) strategi ideologi (misalnya, menciptakan musuh publik dibandingkan dengan pencitraan positif kepolisian), dan (4) relasi kuasa (misalnya, bagaimana media memediasi dan memperkuat legitimasi institusi). Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian meneliti bagaimana bahasa menjadi alat kekuasaan yang menormalisasi dominasi melalui pemberitaan.

Penelitian keempat oleh (Luhut et al., 2022). Penelitian ini terbit pada tahun 2022 dan berfokus pada konstruksi wacana politik melalui berita tentang Luhut di tiga media daring Detik.com, Poskota.co.id, dan Wartaekonomi.com. Menurut penelitian tersebut, media menggunakan strategi representasi, struktur sintaksis, dan kosakata untuk mencitrakan Luhut secara negatif maupun positif. Contohnya, mereka menunjukkan Luhut sebagai orang yang tidak mau mengungkapkan data penting yang

menyebabkan penundaan pemilu, dan dia digambarkan sebagai orang yang sangat berpengaruh hingga presiden mengikuti keputusannya. Perbedaan utama terletak pada: (1) Objek wacana (menteri politik versus aparat kepolisian), (2) arah representasi (kritik dan penguatan pengaruh politik versus citra heroik dan penghargaan), (3) konteks sosial (pertarungan wacana pemilu versus legitimasi tindakan aparat pasca demonstrasi), dan (4) aktor kuasa (media yang menggambarkan Luhut sebagai sumber kekuatan versus media yang memperkuat institusi kepolisian). Persamaannya, kedua penelitian menunjukkan bagaimana media online menciptakan ideologi dominan dan mengatur relasi kuasa melalui penggunaan bahasa. (Luhut et al., 2022)

Penelitian kelima oleh (Ikhsan, 2022). Penelitian ini terbit pada tahun 2022 dan berfokus meneliti wacana kritis tentang pelayanan Polri dengan menggunakan aktivisme digital di Twitter. Studi ini menemukan bahwa aktivis digital menggunakan tiga teknik framing untuk mendelegitimasi, mengungkapkan frustrasi, dan melakukan komparasi untuk menciptakan citra negatif institusi kepolisian. Mereka melakukan ini dengan menganalisis teks, proses produksi dan penyebaran wacana, konteks sosiokultural, dan tiga dimensi Fairclough. Perbedaannya terletak pada tiga hal: (1) objek dan sumber data (netizen tweet versus berita jurnalistik), (2) arah relasi kuasa (netizen menantang institusi versus media mengafirmasi institusi), dan (3) ideologi (kritik dan delegitimasi versus glorifikasi dan legitimasi). Namun, kesamaan mereka terletak pada fakta bahwa mereka keduanya berusaha untuk mengungkap bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan menyebarkan ideologi dan kekuasaan melalui pendekatan Fairclough yang mencakup praktik sosial, praktik wacana, dan teks.

Berdasarkan telaah pustaka kelima penelitian sebelumnya menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough untuk mengungkap hubungan antara ideologi dan kuasa yang tersembunyi di balik teks media, seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan literatur. Bahasa yang ditemukan dalam teks media bukan hanya alat untuk berkomunikasi tetapi juga untuk menciptakan kekuasaan, menurut penelitian ini. Bahasa ini dapat digunakan untuk menstigmatisasi kelompok tertentu, mempertahankan atau mengubah citra politisi, dan membuat ruang untuk resistensi publik terhadap institusi negara. Penelitian ini mengeksplorasi berita tentang kenaikan pangkat polisi korban demonstrasi di Detik.com, dengan penekanan pada hubungan

kuasa dan ideologi dalam berita. Penemuan ini memberikan pijakan teoretis dan metodologis untuk penelitian ini. Studi ini berbeda dari studi sebelumnya yang banyak menekankan diskusi kritik atau perlawanan. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada praktik legitimasi dan glorifikasi institusi kepolisian melalui konstruksi teks media daring. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan relevansi teori Fairclough untuk menyelidiki bagaimana Detik.com menginterpretasikan kenaikan pangkat polisi sebagai bentuk penghargaan negara. Selain itu, penelitian sebelumnya dilengkapi dengan pandangan baru tentang ritual legitimasi kekuasaan dalam wacana media.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai pendekatan dan melibatkan interpretasi dan pendekatan alamiah pada materi subjeknya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif menyelidiki segala sesuatu dalam lingkungan alaminya, berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena dalam konteks masyarakatnya. Metode kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan beragam melalui teknik seperti observasi partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam (Nurrisa et al., 2025). Untuk mencapai hasil penelitian yang layak, penelitian kualitatif membutuhkan analisis data yang cermat. Artikel ini akan membahas konsep penelitian kualitatif secara menyeluruh (Yusanto, 2020). Peneliti kualitatif harus memahami konteks latar belakang dan peristiwa alam yang berkaitan dengan subjek penelitian mereka. Setiap peristiwa ini unik karena konteksnya tidak sama. Dengan memfokuskan pada penjelasan rinci dan mendalam tentang kondisi yang natural (*setting natural*), penelitian kualitatif bertujuan untuk menguasai situasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan studi menurut kenyataannya (Malahati et al., 2023). Analisis Wacana Kritis (AWK) oleh Norman Fairclough digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menemukan makna, hubungan kuasa, dan ideologi yang tersembunyi dalam teks berita. Berita yang dipublikasikan oleh Detik.com tentang kenaikan pangkat polisi korban demonstrasi dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi isi dan periode penerbitan. Data dikumpulkan dengan membaca, menyimak, dan mencatat elemen bahasa yang berhubungan dengan representasi kepolisian, hubungan kuasa, dan

ideologi. AWK Fairclough, teks, praktik diskursif, dan praktik sosial adalah tiga dimensi yang dipakai untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi teks

Data 1

"Kalau ada korban, yang salah adalah yang buat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa jadi korban dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru," katanya.

Pada data pertama terlihat jelas bahwa bahasa yang digunakan membentuk legitimasi. "Polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru" menunjukkan bahwa polisi adalah institusi yang adil dan bertanggung jawab, sedangkan kalimat "yang salah adalah yang buat kerusuhan" secara tegas menunjukkan bahwa massa sebagai pihak yang bersalah. Oleh karena itu, teks ini menunjukkan ideologi pro-negara dan relasi kuasa antara pemerintah, aparat, dan massa. Penggunaan kata-kata seperti "rakyat tidak berdosa" juga menunjukkan ideologi pro-negara dan framing bahwa aparat mendukung masyarakat sipil.

Data 2

"Tapi jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban, polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok Tanah Air," tuturnya.

Kutipan ini paling tepat dianalisis melalui dimensi teks dalam kerangka Norman Fairclough, karena kekuatan wacananya sangat terlihat pada pemilihan kata dan konstruksi kalimat. "Jangan lupa" adalah ajakan sekaligus peringatan retorik yang mengimbau pembaca untuk selalu mengingat jasa polisi. Dengan menggunakan kata "berkorban", aparat digambarkan sebagai heroik, seolah-olah pengorbanan mereka merupakan bagian dari pengabdian suci mereka kepada bangsa. Selain itu, klausa "polisi siang malam menjaga keamanan" menunjukkan ketekunan dan komitmen penuh aparat, memberikan kesan bahwa mereka bekerja tanpa henti untuk kepentingan masyarakat. Frasa "di seluruh pelosok Tanah Air" menunjukkan bahwa polisi menjaga keamanan nasional secara keseluruhan dan mencakup wilayah terpencil.

Dari segi ideologi, kutipan ini menunjukkan perspektif pro-negara yang menganggap aparat sebagai pahlawan dan pelindung rakyat. Bahasanya tidak netral, tetapi berusaha mempromosikan peran polisi dalam masyarakat dengan menciptakan citra yang sangat positif. Teks ini menegaskan pada level relasi kuasa bahwa negara, melalui aparat keamanannya, adalah aktor utama yang layak dihormati, dan masyarakat diminta untuk menerima narasi tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks teks, bahasa digunakan bukan hanya untuk memberikan informasi tetapi juga untuk membentuk opini publik yang mendukung aparat sebagai lembaga yang menjaga bangsa.

Data 3

"Di berbagai tempat saya dapat laporan datang truk-truk di situ ada petasan-petasan yang besar dan ini anggota banyak kena petasan, ada yang terbakar leher, ada paha, kebanyakan laki-laki terbakar alat vitalnya, ini menurut saya sudah perusuh, niatnya bakar," katanya.

Pilihan kata seperti "petasan-petasan yang besar" dan "terbakar leher, paha, alat vital" menunjukkan detail yang dramatis sehingga menimbulkan efek emosional pada pembaca atau pendengar. Deskripsi luka-luka fisik polisi memberi kesan bahwa ancaman yang dihadapi polisi adalah serius dan berbahaya. Dengan demikian, legitimasi bahwa aparat benar-benar berada di posisi korban yang harus dilindungi diperkuat. Selain itu, frasa "ini menurut saya sudah perusuh, niatnya bakar" menunjukkan bahwa massa dilabeli dengan negatif. Kata "perusuh" bukan sekadar deskripsi netral, melainkan label ideologis yang mengandung stigma, sehingga membedakan massa dari kategori "demonstran damai" yang sah menurut hukum. Dengan label ini, audiens dipengaruhi untuk melihat pihak massa sebagai ancaman keamanan daripada hanya warga yang menyuarakan aspirasi mereka. Di level teks, bahasa digunakan sebagai alat untuk menegaskan ideologi pro-negara dan massa digambarkan sebagai individu yang menghancurkan, sementara aparat digambarkan sebagai korban sebenarnya.

B. Dimensi wacana praktik

Analisis dalam dimensi praktik wacana berfokus pada cara teks dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi di ruang sosial. Berita "Prabowo Akan Naikkan

Pangkat Polisi Korban Aksi Massa" di detik.com menunjukkan bahwa Prabowo, sebagai presiden Indonesia, awalnya menciptakan wacana tersebut. Kemudian, pernyataan-pernyataan Prabowo direkam, dikutip, dan dipublikasikan ulang oleh Detik, sebuah media daring yang sangat populer. Pada titik ini, terlihat bahwa media bertindak sebagai perantara yang tidak netral, memilih kutipan untuk dipublikasikan. Kutipan yang dipilih lebih menonjolkan pengorbanan aparat dan tindakan negara yang jelas dan sah, seperti cerita tentang polisi yang menjadi korban atau berkorban untuk menjaga keamanan, hingga keputusan untuk menaikkan pangkat sebagai penghargaan negara. Sebaliknya, massa aksi disebut sebagai "perusuh" atau "pelaku kerusuhan".

Dalam hal distribusi, narasi yang dibuat dapat dengan mudah diterima publik karena berita tersebar melalui kanal berita online yang memiliki jangkauan luas. Ketika berita diakses, dibagikan ulang melalui media sosial, atau dijadikan rujukan oleh media lain, proses reproduksi wacana terjadi, yang memperkuat pembicaraan negara tentang aparat sebagai pahlawan dan massa sebagai ancaman. Konsumen wacana dalam hal ini adalah kelompok pembaca yang tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga diarahkan ke kerangka berpikir tertentu, yaitu bahwa aparat harus dihormati dan dilindungi, dan demonstrasi yang tidak sesuai aturan pantas dianggap kerusuhan. Oleh karena itu, konsumsi wacana tidak bebas, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana media mempresentasikan wacana dan bagaimana posisi narasumber.

Dari perspektif ideologis, praktik wacana ini menggambarkan hubungan antara negara dan media dalam mempertahankan dominasi wacana tertentu. Negara melalui pejabatnya menggunakan bahasa untuk menegaskan peran aparat sebagai pihak yang sah dalam menjaga keamanan, dan media berfungsi sebagai sarana untuk memberi tahu khalayak tentang konstruksi tersebut. Narasi alternatif, seperti suara massa atau kritik terhadap aparat, hampir tidak muncul dalam pemberitaan. Ini menunjukkan bagaimana wacana berfungsi sebagai alat hegemoni, yaitu negara menciptakan wacana, media mereplikasi dan menyebarkan, dan masyarakat mengonsumsi dan menginternalisasi pesan yang telah dibungkus dalam ideologi pro-negara.

C. Dimensi praktik sosiokultural

Data 1

"Semua petugas dinaikin pangkat, dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir," ujar Prabowo kepada wartawan, Senin (1/9).

Kutipan ini tidak hanya mencakup deskripsi teks, tapi juga mencakup praktik sosiokultural seperti kebijakan kenaikan pangkat. Aparat yang dianggap "membela negara dan rakyat" dianggap layak menerima penghargaan simbolis dari negara melalui pemberian pangkat. Nasionalisme dan dominasi negara digambarkan dengan frasa "membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir", yang menunjukkan bahwa aparat dianggap sebagai benteng yang melindungi bangsa dari ancaman. Ini menunjukkan lingkungan sosial-kultural di Indonesia, di mana aparat negara diberi legitimasi dan penghargaan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Data 2

"Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang," ujarnya.

Karena mengandung penekanan pada nilai-nilai hukum, norma, dan ideologi politik yang berlaku di masyarakat Indonesia, kutipan ini paling tepat dianalisis dari perspektif praktik sosiokultural. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang kebebasan berpendapat, pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara melindungi hak rakyat untuk berbicara di depan umum. Meskipun kebebasan itu tidak mutlak, demonstrasi harus dilakukan dengan damai, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Ini menunjukkan ideologi demokrasi prosedural yang berlaku di Indonesia. Meskipun negara menunjukkan dirinya sebagai penjaga hak sipil, ia tetap membatasi kebebasan. Dengan kata lain, ada relasi kuasa hegemonik: rakyat diizinkan untuk menyuarakan keinginan mereka, tetapi negara memiliki kuasa tertinggi untuk menetapkan batas dan aturan. Dari perspektif praktik sosial-kultural, diskusi ini berkaitan dengan situasi politik di Indonesia, yang sering dihadapkan pada demonstrasi massal. Karena melindungi demonstrasi yang

"murni" dan damai, pemerintah berusaha menciptakan kesan bahwa aparat tidak anti-demokrasi, sekaligus menjaga agar ruang publik tetap diawasi oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini, bahasa digunakan sebagai alat ideologis untuk menggambarkan fungsi negara sebagai penjaga dan penguasa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa berita "Prabowo Akan Naikkan Pangkat Polisi Korban Aksi Massa" di Detik.com penuh dengan hubungan kuasa dan keyakinan pro-negara daripada bersifat netral. Dalam dimensi teks, aparat digambarkan sebagai korban dan pahlawan, sedangkan demonstran digambarkan sebagai negatif. Dalam hal dimensi praktik wacana, akses ke wacana dimonopoli oleh Presiden tanpa ada suara tandingan, yang memungkinkan media untuk mereproduksi narasi negara. Di sisi lain, dalam hal dimensi praktik sosiokultural, wacana ini menegaskan ideologi keamanan dan ketertiban yang menormalisasi kontrol negara atas kebebasan publik. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam teks berita berfungsi sebagai alat hegemonik untuk meningkatkan legitimasi negara dan mengontrol persepsi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79–86.
- Ikhsan, Y. (2022). Pembingkai Citra Polisi pada Tagar #PercumaLaporPolisi (Analisis Wacana Kritis Metode Norman Fairclough). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 217–224.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2889>
- Khotimah, K., & Khotimah, K. (2024). Wacana Kritis Norman Fairclough Berita Media Massa Daring: Jepang Buang Limbah Nuklir. *PRASASTI: Journal of Linguistics*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.20961/prasasti.v9i1.80878>
- Luhut, M., Pandjaitan, B., & Media, D. I. (2022). *BAHAS, Volume 33 Nomor 2 Tahun 2022* 138. 33, 138–146.
- Mada, U. G. (2020). *Deskripsi Bahasa Kuasa dan Ideologi Indonesia terhadap Anarko-*

Sindikalis : Analisis Wacana. 3(2), 116–126.

- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks. *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUIKASI MASSA Section*, 2(1), 51–64.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793–800.
- Sari, W. P., Setyonegoro, A., & Priyanto. (2025). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Internasionalisasi Bahasa Indonesia Di Media Antaranews.com. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, Dan Sastra*, 3(1), 366–380. <https://doi.org/10.59638/isolek.v3i1.417>
- Sumber, S., Siswa, B., & Sd, K. (2024). 1 *, 2 1,2. 09(8), 4853–4861.
- Yoserizal, M. (2018). Jurnal Pengembangan Masyarakat MEDIA MASSA DAN JURNALISME: Kajian Pemaknaan Antara Media Massa Cetak dan Jurnalistik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 81–92. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/4988>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1). *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13.